

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 31 ayat (1) yang berbunyi “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”. Dalam hal ini diamanatkan pada pemerintah untuk dapat memberikan akses pada masyarakat untuk mengenyam pendidikan guna mengembangkan potensi yang dimiliki secara maksimal. Hal tersebut mempertegas kewajiban pemerintah dalam mengupayakan akses yang mudah bagi masyarakat dalam mengenyam pendidikan seperti tujuan yang harus dicapai oleh pemerintah yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan hal tersebut hanya dapat dicapai jika ada akses yang baik bagi masyarakat. (Undang-undang RI tahun 1945 pasal 31 ayat (1) )

Berdasarkan ketentuan yang dimuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yang dimaksud dengan pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan republik indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. (Undang-undang RI No. 23 Tahun 2014)

Pendidikan menjadi suatu penentu agar bangsa kita dapat melangkah lebih maju serta mampu bersaing dengan Negara-negara lain. Pendidikan berfungsi untuk

mengembangkan potensi yang dimiliki agar dapat digunakan sesuai dengan kebutuhannya. Sekolah sebagai salah satu lembaga yang memiliki tugas dan fungsi untuk mengupayakan dan meningkatkan serta melakukan pembinaan terhadap potensi-potensi para siswa sehingga memiliki suatu kualitas dalam pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam hidup masyarakat. Melalui pendidikan yang lebih tinggi seseorang akan dibekali pengetahuan serta keterampilan yang dibutuhkan dalam melakukan sesuatu untuk peningkatan kualitas hidup pendidikan. Pendidikan sebagai gejala manusiawi dan sekaligus upaya sadar, didalamnya tidak terlepas dari keterbatasan-keterbatasan yang dapat melekat pada peserta didik, pendidik, interaksi pendidikan, serta pada lingkungan dan sarana pendidikan (Dwi Siswono. 2008 :27)

Direktori Perguruan Tinggi Swasta Kopertis Wilayah IX Sulawesi Kemenristek Dikti RI 2016 Provinsi Gorontalo memiliki 15 kampus Negeri maupun Swasta yang tersebar di 6 Kabupaten yaitu Kabupaten Bone Bolango, Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Pohuwato untuk menunjang sumber daya manusia di Gorontalo. Sebagian besar universitas yang ada di Gorontalo telah Terakreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) serta memiliki berbagai bidang keilmuan lengkap yang berstandar nasional untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Kabupaten Gorontalo memiliki 3 kampus besar yaitu Universitas Gorontalo, Universitas Muhammadiyah Gorontalo dan Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Sultan Amai Gorontalo, hal ini akan menjadi kesempatan untuk anak lulusan SMA/SMK di Kelurahan Biyonga yang ingin melanjutkan pendidikan keperguruan tinggi dengan alasan untuk mengurangi besarnya biaya transportasi karena ke tiga kampus tersebut berada di wilayah Kabupaten Gorontalo. Sehingga alasan orangtua dalam persoalan biaya transportasi untuk tidak melanjutkan anaknya ke perguruan tinggi dapat terbantuan. (<http://id.wikipedia.org>)

Tahun 2009 jumlah penduduk Kelurahan Biyonga sebanyak 3.324 jiwa dan sekitar 2.533 jiwa yang termasuk dalam kategori kurang mampu. Hal ini terlihat dari mata pencaharian masyarakat adalah petani dengan penghasilan yang tidak stabil. Tahun 2018 jumlah penduduk Kelurahan Biyongan sebanyak 1675 jiwa dan yang kurang mampu sebanyak 324 KK (Laporan Tahunan Kelurahan Biyonga, 2018).

Jumlah penduduk Kelurahan Biyonga tahun 2018 orang yang tidak melanjutkan studi keperguruan tinggi sebanyak 1.599 orang dan yang melanjutkan studi hingga keperguruan tinggi sebanyak 114 orang. Total jumlah penduduk di Kelurahan Biyonga berdasarkan tingkat pendidikan sebanyak 1.713 orang (Laporan Tahunan Kelurahan Biyonga, 2018). Hal ini terlihat dari hampir setiap lingkungan yang ada di Kelurahan Biyonga terdapat banyak anak yang tidak mampu melanjutkan pendidikan keperguruan tinggi disebabkan karena kondisi ekonomi keluarga yang memprihatinkan. Kondisi ekonomi yang menjadi penghambat seseorang untuk memahami keinginannya untuk melanjutkan pendidikan sedangkan kondisi ekonomi seperti ini disebabkan berbagai faktor diantaranya orang tua tidak mempunyai

pekerjaan yang tetap, tidak mempunyai keterampilan khusus, keterbatasan kemampuan, dan penghasilan tidak stabil. Selain itu, masalah keluarga yang diakibatkan oleh perceraian orang tua dan faktor lingkungan seperti pergaulan yang tidak baik untuk pendidikan anak. (Indriyani dkk. 2013:78)

Penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa faktor permasalahan utama dihadapi oleh masyarakat Kelurahan Biyonga yaitu faktor ekonomi, kemauan sendiri serta masalah perceraian orang tua. sehingga melalui program rumah layak huni yang di anggarkan dapat menekan jumlah angka kemiskinan dan faktor pendidikan yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi. ( Adiwinata Saliho (2019:10)

Menurut Abdulsyani *dalam* Ratnasari (2013:21), Kondisi ekonomi merupakan kedudukan atau posisi seseorang dalam kelompok manusia yang ditentukan oleh jenis aktifitas ekonomi, pendapatan, dan kemampuan memenuhi kebutuhan. Kondisi orang tua sangat mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat pendidikan anak. Ada beberapa faktor yang dapat menentukan tinggi rendahnya keadaan ekonomi orang tua di masyarakat, diantaranya tingkat pendapatan, tingkat pengeluaran, tabungan (simpanan) dan kepemilikan harta yang bernilai ekonomis. Pada umumnya anak yang berasal dari keluarga menengah keatas lebih banyak mendapatkan pengarahan akan pentingnya pendidikan untuk masa depan. Anak-anak yang berlatar belakang ekonomi rendah, kurang dapat mendapat pengarahan yang cukup dari orang tua mereka karena orang tua lebih memusatkan perhatiannya pada bagaimana untuk memenuhi kebutuhan sehari hari.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian tentang *“Peran Pemerintah Terhadap Kepedulian Orang Tua dalam Melanjutkan Studi Anak ke Perguruan Tinggi di Kelurahan Biyonga Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo”*.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

- a. Bagaimana peran pemerintah kelurahan Biyonga terhadap kepedulian orang tua dalam melanjutkan studi anak keperguruan tinggi?
- b. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi kurangnya kepedulian orang tua dalam melanjutkan studi anak keperguruan tinggi?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini yaitu:

- a. Mengetahui peran pemerintah kelurahan Biyonga terhadap kepedulian orang tua dalam meningkatkan studi anak keperguruan tinggi
- b. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kurangnya kepedulian orang tua dalam melanjutkan studi anak keperguruan tinggi

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan keilmuan dalam bidang akademis dan memberikan wacana tentang keputusan orang tua dalam memberikan kesempatan melanjutkan studi anak keperguruan tinggi.

b. Secara Praktis

Manfaat penelitian secara praktis yaitu:

- 1) Dapat memberikan informasi kepada para orang tua dan pihak-pihak terkait seperti LSM dan Pejabat Kelurahan tentang arti pentingnya pendidikan tinggi bagi seorang anak.
- 2) Hasil penelitian ini dapat di jadikan sebagai bahan bacaan yang dapat memperkaya kepustakaan dan dapat dijadikan sebagai bahan banding untuk penelitian yang relevan.